



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1478/SEK/OT.01.1/7/2021 Jakarta, 6 Juli 2021
Lampiran : -
Hal : Langkah-Langkah Persiapan Pelaporan Kinerja Anggaran Semester I TA 2021 melalui Aplikasi SMART-DJA

Yth. 1. Seluruh Sekretaris Eselon I;
2. Seluruh Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan.

di -
Tempat

Sebagai tindak lanjut atas Surat Direktorat Jenderal Anggaran No. S-19/AG/AG.8/2021 Tanggal 29 Juni 2021 Perihal Langkah-langkah Evaluasi Kinerja Anggaran Semester I TA 2021 melalui Aplikasi SMART dan hasil rapat koordinasi online antar Eselon I dengan Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Penganggaran – DJA pada tanggal 29 Juni 2021 serta untuk perbaikan hasil penilaian kinerja penganggaran Mahkamah Agung RI dari TA 2020, bersama ini disampaikan langkah-langkah persiapan pelaksanaan monitoring kinerja anggaran pada Semester I TA 2021:

1. Untuk meningkatkan kualitas belanja Mahkamah Agung (*quality spending*), perlu dilakukan monitoring dan evaluasi Kinerja Anggaran Mahkamah Agung RI secara periodik dan akurat, yang pelaksanaan pelaporannya untuk T.A. 2021 telah difasilitasi melalui pengembangan (*update*) Aplikasi SMART - DJA untuk level K/L, Unit Eselon I dan Satker yang bisa diakses pada <https://smart.kemenkeu.go.id/>
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah untuk persiapan pelaporan kinerja anggaran Mahkamah Agung Semester I T.A. 2021 sebagai berikut:
 - a. Level Unit Eselon I, dan Satker agar mengoptimalkan pencapaian kinerja anggaran yang berada dalam kewenangannya **paling lambat tanggal 8 Juli 2021 pukul 17.00 WIB.**
 - b. Level Unit Eselon I agar segera menyelesaikan tugas dan kewenangannya terkait pelaksanaan EKA Semester I T.A. 2021 sebagai berikut:
 - 1) Melakukan input data Realisasi Indikator Output Program dan Realisasi Indikator Kinerja Program pada aplikasi SMART;
 - 2) Melakukan konfirmasi/validasi atas pelaporan Realisasi Volume Rincian Output Satker yang berada dalam kewenangannya;
 - 3) Melakukan pelaporan Evaluasi Kinerja Anggaran Semester I T.A. 2021 level Unit Eselon I pada Aplikasi SMART;
 - 4) Melakukan monitoring/pemantauan atas ketertiban pelaporan Semester I T.A. 2021 pada Aplikasi SMART oleh Satker yang berada dalam kewenangannya.
 - c. Level Satker (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama) agar segera menyelesaikan tugas dan kewenangannya terkait pelaksanaan EKA Semester I T.A. 2021 sebagai berikut:

- 1) Memastikan pengisian SAKTI/SAS sesuai ketentuan, khususnya terkait data yang akan dilakukan integrasi data pada Aplikasi SMART (Realisasi anggaran per RO, Realisasi Volume RO, progres dan keterangan);
 - 2) Memastikan Realisasi Volume RO, progres dan keterangan telah terisi pada kolom Data Integrasi pada Aplikasi SMART;
 - 3) Dalam hal kolom Data Integrasi belum terisi hingga batas waktu yang ditentukan atau terdapat ketidaksesuaian data pada kolom Data Integrasi dengan kondisi riil, dilakukan perbaikan pada Aplikasi SMART dengan mengisi data pada kolom Koreksi;
 - 4) Melakukan pelaporan evaluasi kinerja Anggaran Semester I T.A. 2021 level Satker pada Aplikasi SMART.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta agar Saudara/i dapat menindaklanjuti langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada butir 2 untuk selanjutnya akan kami lakukan monitoring/pemantauan capaian Nilai Kinerja Anggaran seluruh Unit Eselon I - Semester I T.A. 2021 dan hasilnya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
4. Apabila terdapat kendala/permasalahan dalam pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas, dipersilahkan untuk menyampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi melalui email bimonrenog@gmail.com atau pic di masing-masing Unit Eselon I.

Demikian disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Y.M Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial;
2. Kepala Badan Pengawasan;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN;
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
9. Kepala Biro Keuangan.